

Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Masa Covid-19

The Effect of Communication on The Performance of The State Civil Apparatus in The Regional Council of People's Representatives of The Province of North Sumatera During The Covid-19 Period

Ara Auza

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 08 Maret 2023; Direview: 09 Maret 2023; Disetujui: 31 Mei 2023

Email: ara@staff.uma.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Komunikasi terhadap kinerja Aparat Sipil Negara pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan teori Komunikasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 106 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh Komunikasi Aparatur Sipil Negara terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,383. Tingkat korelasi hubungan yang rendah tapi pasti antara variabel komunikasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara pada masa Covid-19 di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Komunikasi; Kinerja; Aparatur Sipil Negara; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Abstract

This article aims to determine the effect of Communication on the performance of the State Civil Apparatus during the Covid-19 pandemic at the Regional People's Representative Council Office of North Sumatera Province. This study uses the theory of Communication. This research was examined at the Regional People's Legislative Council Office of North Sumatera Province. The research method used in this research is correlational quantitative. The population in this study is the State Civil Apparatus (ASN) in the Regional People's Representative Council Office of North Sumatera Province, totaling 106 people. The results of this study indicate that: (1) There is an influence of State Civil Apparatus Communication on the performance of State Civil Apparatuses in the Regional House of Representatives of North Sumatera Province of 0.383. The level of correlation is low but sure between the communication variables of the State Civil Apparatus and the Performance of the State Civil Apparatus during the Covid-19 period in the Regional People's Representative Council of North Sumatera Province.

Keywords: Communication; Performance; State Civil Apparatus; Regional People's Representative Council of North Sumatera Province

How to Cite: Auza, A., (2023). Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Masa Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (3): 127-131.



PENDAHULUAN

Tahun 2020 Indonesia dilanda oleh Coronavirus - 19 (Covid - 19) yang menyebabkan terjadinya pandemi diberbagai belahan dunia. Coronavirus merupakan bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS (sumber:<https://www.kemkes.go.id>). Pandemi covid-19 diyakini bermula dari ditemukannya kasus pertama pada akhir Desember 2019 di Wuhan, China hingga akhirnya menyebar sampai ke Indonesia (Saputra et al., 2022; Tawai et al., 2021)(Suharyanto et al., 2021). Tingginya kasus Covid-19 di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan dari berbagai aspek dan bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan gaya hidup. Salah satu perubahan yang terjadi adalah tidak ada sekolah yang belajar tatap muka, dan sistem kerja yang berubah dari *Work From Office* (WFO) menjadi *Work From Home* (WFH). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Banyaknya perusahaan dan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan karena terpengaruh oleh Pandemi Covid-19. Hal itu diakibatkan karena adanya penurunan aktifitas perusahaan yang dibatasi dengan mengutamakan protokol kesehatan dan adanya keterbatasan izin perusahaan dalam beroperasi. Keterbatasan izin operasional perusahaan tidak hanya berdampak pada pihak swasta namun juga berpengaruh terhadap pelayanan publik (Hartono & Rahadi, 2021). Instansi Pelayanan publik yang diperankan oleh Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang - Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil terpaksa beradaptasi dengan cepat disituasi saat ini. Penyelenggaraan pelayanan publik selama ini belum memiliki dampak yang luas terhadap perubahan aspek kehidupan masyarakat. Kondisi instansi pemerintah saat ini masih belum efektif dan efisien selain itu kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Negara juga belum memadai (Wuri, 2022)

Situasi pandemi Covid-19 di Sumatera Utara sangat mempengaruhi pelayanan publik yang menjadi kurang maksimal. Birokasi diciptakan sebagai upaya pelaksanaan administrasi dalam pelayanan publik. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses setiap layanan dan perlindungan (Adnan, 2013; Pasolong, 2021; Yusriadi, 2018). Pemerintah merubah sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara dalam memberikan Pelayanan Publik selama pandemi (kemenkumham.go.id). Perubahan sistem kerja bagi ASN bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Pemerintah mengambil kebijakan *Work From Home* (WFH) bagi ASN. Meski bekerja dari rumah, bukan berarti para pegawai Aparatur Sipil Negara libur dalam memberikan pelayanan publik, namun mereka tetap memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi Informasi. Perubahan sistem kerja ini tentunya menghadapi pro dan kontra sehingga pada proses pelaksanaannya masih belum bisa maksimal. Kebijakan WFH menimbulkan permasalahan bagi perusahaan dan instansi pemerintah karena masih banyak tenaga kerja dan perusahaan yang masih belum siap beradaptasi dengan situasi dan teknologi yang baru (Purwanto et al., 2020). Banyak instansi pemerintah yang belum memiliki data yang sudah terintegrasi secara online, sehingga ketika ASN membutuhkan data, mereka tetap harus mengambil dalam bentuk fisik ke kantor (Krisyohana, 2020). Pada akhirnya membuat pelayanan publik menjadi tidak maksimal karena sistem yang ada belum mendukung untuk pelaksanaan pelayanan secara daring (Panghegar & Atmojo, 2021).

Kendala lain yang mempengaruhi kinerja ASN dilingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah perubahan sistem kerja, berdasarkan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor: 440-842 tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor: 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Aturan New Normal yang produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019. Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan juga memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Aturan Normal Baru. Berdasarkan hal ini pemerintah Sumatera Utara merubah sistem kerja ASN yang pada awalnya



100% Work Form Office (WFO) menjadi 70% Work From Home (WFH) dan 30% Work From Office (WFO). ASN yang terbiasa bekerja tatap muka harus beradaptasi dengan perubahansistem kerja ini. Proses adaptasi mengalami beberapa kendala dalam memberikan pelayanan publik, yaitu ada proses komunikasi yang tertunda dan kurangnyakecakapan beberapa ASN terhadap penggunaan teknologi dengan hadirnya istilahbaru dalam dunia kerja karena sistem daring yang menimbulkan gangguan dalam komunikasi yang terjalin.

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, misalnya Hesti Sutanti, Sofiyon Matodang & Fenny Krisna Marpaung (2022), Pengaruh Kompetensi dan Komunikasi Pelaksanaan Work From Home terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara di Masa Pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini antara lain: Terdapat pengaruh Kompetensi ASN terhadap Kinerja ASN di Lingkungan DPRD Pemprovsumu selama masa pandemic (Sutanti et al., 2022).

Penelitian dari Yustanti, Ariska, Reza, Karim & Susanti (2021), bahwa COVID19 telah mengubah banyak pengaturan dan budaya kerja seperti Work From Home (WFH). Pemerintah memberlakukan kebijakan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari rumah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan memahami dan menggunakan teknologi di masa pandemi yang dimoderatori oleh WFH dalam meningkatkan kinerja ASN di Kabupaten Kepahiang di masa pandemi COVID 19. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai R Square sebesar 0,705 (0,714-0,009) atau peningkatan pengaruh sebelum dan sesudah WFH sebesar 70,5%. Artinya, kinerja ASN (Y) meningkat setelah pemerintah Kabupaten Kepahiang menerapkan kebijakan kepala ASN untuk bekerja di rumah selama pandemi. Sebelum adanya kebijakan WFH oleh pemerintah, kinerja ASN hanya 9%. Dengan adanya variabel moderasi (Work From Home) dapat memperkuat pengaruh variabel Kemampuan memahami dan menggunakan (X1) terhadap kinerja ASN (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa "Hipotesis Diterima" sehingga dapat dikatakan bahwa adanya variabel moderasi atau Work From Home (WFH) dapat memperkuat atau meningkatkan pengaruh variabel Kinerja ASN (Y) pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Yustanti et al., 2021).

Penelitian dari Riendika & Waskito (2022), bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada kemajuan bagi pemerintah untuk bertahan dari perubahan dan persaingan di lingkungan pemerintahan yang terkadang tidak stabil. Masalah lainnya adalah sorotan terhadap kinerja birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dimana di masa pandemi ini pemerintah dinilai memiliki kinerja yang rendah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dari hasil uji hipotesis secara parsial di dapatkah nilai t hitung variabel Motivasi termasuk dalam klasifikasi sedang yang berarti pengaruh yang signifikan. Efektifitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari Komunikasi yang mereka miliki sebagai AS.(Riendika & Waskito, 2022).

Penelitian dari Panghegar & Atmojo (2021), bahwa dalam kinerja Aparat Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, berdasarkan indikator kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan kerja dan prestasi kerja dengan adanya pandemic covid-19, tidak berpengaruh besar pada kinerja, akan tetapi, yang berpengaruh adalah mekanisme pelayanan yang menerapkan protokol kesehatan seperti social distancing, menggunakan masker, pembatasan jumlah masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan (Panghegar & Atmojo, 2021).

Melihat fenomena dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Komunikasi terhadap kinerja Aparat Sipil Negara pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan. Lokasi penelitian dipilih



berdasarkan kebutuhan penelitian yaitu menganalisis pengaruh Komunikasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan DPRD Sumatera Utara yang berjumlah 106 orang. Populasi dalam penelitian ini berjenis heterogen yaitu unsur-unsur dalam populasi tersebut memiliki sifat yang beragam. Tentunya populasi jenis ini perlu batas-batas yang harus ditetapkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teknik Total sampling sehingga seluruh Populasi adalah Sampel. Sampel penelitian ini berjumlah 106 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut (Nawawi, 2012), metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Arikunto, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan penyebaran kuisioner kepada Aparatur Sipil Negara yang sudah terdata sebagai sampel penelitian yang berjumlah 106. Kuisioner penelitian tersebut berisi sekitar 36 pertanyaan terkait pengetahuan ASN mengenai Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Komunikasi Aparatur Sipil Negara. Mayoritas usia pegawai aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan kantor Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah 41 s/d 50 tahun. Data diatas menunjukkan terdapat 22 responden (20.8%) yang berusia 31 s.d 40 Tahun dan terdapat 23 responden (21.7%) yang berusia lebih dari 50 tahun. Sementara itu terdapat hanya 2 responden yang berusia 21 s.d 30 tahun. Frekuensi tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan setingkat perguruan tinggi (S1, S2, S3) yaitu 89 responden (84%) sementara itu terdapat 13 responden (12.3%) yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMU sederajat. Kemudian terdapat 4 responden (3.8%) yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat Diploma (D1,D2,D3). terdapat 62 responden (58.5%) menyatakan memiliki pendapatan sekitar Rp 3.000.000-Rp 5.000.000 dan terdapat 30 responden (28.3%) menyatakan memiliki pendapat yang lebih besar sekitar Rp. 5.000.000 – Rp. 8.000.000 dan 12 responden (11.3%) yang memiliki pendapatan lebih dari Rp 8.000.000. Sementara itu hanya terdapat 2 responden yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 3.000.000.

Data penelitian menunjukkan tingkat pemahaman dalam komunikasi Aparatur Sipil Negara cukup dominan. Terdapat 75 responden (70.8%) menyatakan setuju, dan terdapat 31 responden (29.2%) menyatakan sangat setuju tingkat pemahaman dalam komunikasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah baik. Selain itu Terdapat 81 responden (76.4%) menyatakan bahwa mereka setuju, dan 17 responden (16%) menyatakan sangat setuju komunikasi yang mereka lakukan menimbulkan kesenangan dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Terdapat 73 responden (68.9%) menyatakan setuju, kemudian 22 responden (20.8%) menyatakan sangat setuju, sementara itu 11 responden (10.4%) menyatakan kurang setuju dengan adanya perubahan sikap dalam proses komunikasi yang mereka lakukan sebagai aparatur sipil negara. Mayoritas responden menjawab setuju dengan tingkat kedekatan dalam hubungan saat melakukan komunikasi sebagai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dilingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari 59 responden (55.7) menyatakan setuju sedangkan 36 responden (34%) menyatakan sangat setuju dan 11 responden (10.4%) menyatakan kurang setuju dengan tingkat kedekatan hubungan dalam komunikasi aparatur sipil Negara dalam menjalankan tugas dilingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu mayoritas responden menyatakan setuju dengan adanya pengaruh pada tindakan dalam Komunikasi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas di lingkungan kantor Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dari terdapat 68 responden (64.2%) menyatakan setuju dengan adanya pengaruh terhadap tindakan dalam komunikasi aparatur sipil negara. Sedangkan terdapat 25 responden (23.6%) yang menyatakan sangat setuju.

Kepedulian yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara menimbulkan kesadaran yang dapat memicu perubahan dalam lingkungan strategis organisasi yang berubah dengan cepat, terutama belajar dari organisasi sejenis melalui benchmarking, dan mampu menyesuaikan diri dengan baik. Perubahan ini yang perlahan tapi pasti terjadi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Citra masyarakat terhadap lembaga ini, perlahan mulai kearah positif setelah pada periode 2009-2014 sejumlah pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sempat berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Periode 2014-2019 dan 2019-sekarang, isu mengenai korupsi sudah minim di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini dapat dimungkinkan dengan kepedulian yang tinggi dari Aparatur Sipil Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil korelasi Spearman, maka diketahui besar korelasi koefisien Spearman (ρ) adalah 0,383. Berdasarkan skala *Guilford*, hasil 0,383 menunjukkan hubungan yang rendah tapi pasti. Tanda korelasi (**) pada koefisien menghasilkan + 0,383 yang menunjukkan arah hubungan yang sama antara variable X₂ dan variable Y. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan semakin tinggi komunikasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka semakin baik kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebaliknya semakin rendah komunikasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka semakin rendah kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uji analisis di atas, dinyatakan bahwa hasil uji hipotesis pada komunikasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah 0,383. Pernyataan berdasarkan rumus *Spearman*, maka r_s koefisien bahwa jika $r_s > 0$ maka hipotesis diterima. Signifikan korelasi diketahui dari probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 ($0,01 < 0,05$) dan tanda ** (*flag of significant*) yang menunjukkan kedua variabel berkorelasi secara signifikan, maka hubungannya adalah signifikan. Terdapat hubungan korelasional positif 0,383 yang memiliki arti bahwa terdapat hubungan yang rendah tapi pasti dengan tingkat korelasi rendah. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa Komunikasi Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Aparatur Sipil Negara berpengaruh secara timbal balik. Selain itu terdapat angka 0.617 yang menunjukkan bahwa ada variable lain yang tidak mempengaruhi namun belum masuk dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Komunikasi Aparatur Sipil Negara berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari angka 0,383 yang menunjukkan ada nya pengaruh dengan tingkat korelasi hubungan yang rendah tapi pasti antara variabel komunikasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara pada masa Covid-19 di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. F. (2013). Reformasi birokrasi pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 12(2), 196–203.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Hartono, A., & Rahadi, D. R. (2021). Work From Home Terhadap Kinerja Karyawan Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1), 16–21.
- Krisyohana, M. (2020). Kesiapan Manajemen ASN untuk WFH. Retrieved from *DetikNews Website: <https://News.Detik.Com/Kolom/d-5049198/Kesiapan-Manajemen-Asn-Untuk-Wfh>*.
- Nawawi, I. (2012). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.



- Panghegar, A. S. A. J., & Atmojo, M. E. (2021). Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Masa Pandemic Covid-19. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 53–59.
- Pasolong, H. (2021). *Kepemimpinan birokrasi*. Penerbit Alfabeta.
- Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. M., Choi, C. H., & Putri, R. S. (2020). Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 1–12. <https://ummaspul.ejournal.id/Edupsyscouns/article/view/397>
- Riendika, M. A., & Waskito, B. (2022). Pengaruh komunikasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada masa pandemi covid-19 di bagian protokol dan komunikasi pimpinan sekretariat daerah kota bandar lampung. *E-JKPP*, 8(1).
- Saputra, R. E., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2022). Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 4(2), 157–163.
- Suharyanto, A., Fernanda, F., Jamaludin, J., Hodriani, H., Wiflihani, W., Muhajir, A., & Lubis, Y. A. (2021). School Readiness in the New Normal Era of Online Teaching and Learning at Junior High School. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil*.
- Sutanti, H., Matodang, S., & Marpaung, F. K. (2022). Pengaruh Kompetensi dan Komunikasi Pelaksanaan Work From Home terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 901–908.
- Tawai, A., Suharyanto, A., Putranto, T. D., De Guzman, B. M. N., & Prastowo, A. A. (2021). Indonesian covid-19 issue on media: review on spiral of silence application theory. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 5(2), 286–301. <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i2.3758>
- Wuri, J. (2022). Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19 (Studi Di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1).
- Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 8(2), 178–185.
- Yustanti, N. V., Ariska, Y. I., Reza, H. K., Karim, K., & Susanti, M. (2021). The Ability To Use Technology On ASN Performance Moderated By WFH During The Pandemic. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 2(6), 1476–1489.
<https://www.kemkes.go.id>
- Undang – Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

